KEMENTERIAN HUKUM
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
DIREKTORAT PIDANA

Nomor SOP	:	AHU-152.OT.02.02
Tanggal Pembuatan	:	10 Maret 2025
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Efektif	:	17 Juli 2025
Disahkan Oleh		Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Hb. Widodo
Nama SOP	:	PEMBERIAN KETERANGAN AHLI HUKUM PIDANA

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 3. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum	1. Memahami lingkup tugas dan fungsi pada bagiannya 2. Memahami prosedur pelayanan hukum pidana 3. Memahami teknologi informasi dan penerapannya dalam aplikasi layanan hukum pidana
KETERKAITAN	**PERALATAN / PERLENGKAPAN**
1. SOP Persuratan 2. SOP Layanan Pengolahan data	1. Komputer 2. Jaringan internet 3. Alat Komunikasi 4. Peraturan Perundang-undangan
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN**
Pelaksanaan proses layanan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan prinsip kehati-hatian.	Diinput sebagai data elektronik dan manual jika suatu saat diperlukan kembali

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENUNJUKAN PEMBERIAN KETERANGAN AHLI HUKUM PIDANA

No	Kegiatan	Pemohon	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
			Direktur Pidana	Katimja PHP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan Penunjukan Saksi Ahli secara online dengan mengakses laman www.ahu.go.id, memilih Menu Layanan Pendapat Hukum dan Keterangan Ahli Hukum Pidana, kemudian mengisi Form registrasi serta mengunggah surat permohonan				1. Surat permohonan	1 hari	Surat permohonan persyaratan telah diunggah ke dalam aplikasi	
2	Menerima dan mendisposisikan surat permohonan keterangan ahli				Data permohonan	1 hari kerja	Disposisi	
3	Menerima disposisi, meneliti dan menunjuk ahli hukum pidana serta menyiapkan konsep surat penunjukan ahli hukum pidana			T	Data permohonan dan disposisi	1 hari kerja	Data dukung dan konsep surat penunjukan Ahli Hukum Pidana	
4	Memeriksa dan memberi persetujuan pada konsep surat penunjukan pemberian keterangan ahli hukum pidana, jika tidak sesuai dikembalikan kepada Timja Pelayanan Hukum Pidana			Y	Data permohonan dan lembar disposisi	1 hari kerja	Konsep Surat Penunjukan Ahli Hukum Pidana	
5	Menerima Surat Penunjukan Ahli				Data permohonan dan lembar disposisi	1 hari kerja	Surat Penunjukan Ahli Hukum Pidana	

